

**PENERAPAN SISTEM ZONASI DALAM KEBIJAKAN PPDB DI INDONESIA: ANALISIS
PERMASALAHAN, DAMPAK, DAN UPAYA PERBAIKAN PENDIDIKAN**

Faradisa Nova Salsabila, Kamila Yasmin, Alif Bagus Permana, Naressa Jihan Ayufiani

Universitas Negeri Semarang

Email: F_nvsaa@student.unnes.ac.id , kamilayasminnn10@students.unnes.ac.id,
alifbagaspermana@students.unnes.ac.id, naressajihan@students.unnes.ac.id.

Abstrak

Sistem zonasi dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) diterapkan pemerintah sebagai upaya untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Meski demikian, pada kenyataannya kebijakan ini masih menciptakan berbagai masalah dan kontroversi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggali penyebab, dampak, dan relevansi kebijakan zonasi terhadap prinsip keadilan pendidikan serta kebijakan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, regulasi pendidikan, serta laporan kasus implementasi zonasi pada periode 2018 sampai 2024. Hasil menunjukkan bahwa masalah utama sistem zonasi bukan berasal dari konsep kebijakan itu sendiri, melainkan karena ketimpangan kualitas antar sekolah, kurangnya persiapan teknis dari pemerintah daerah, tidak validnya data penduduk, dan rendahnya sosialisasi kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan ini terlihat pada tingkat mikro berupa tantangan dalam proses pembelajaran karena perbedaan kemampuan siswa dan menurunnya motivasi belajar, serta pada tingkat makro berupa penguatan stigma terhadap sekolah favorit dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem PPDB. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Hak Atas Pendidikan yang Bermutu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya memperluas kualitas sekolah, memperkuat proses PPDB secara teknis, serta mengevaluasi kebijakan zonasi secara berkelanjutan agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: sistem zonasi, PPDB, pemerataan pendidikan, kebijakan pendidikan, data sekunder

Abstract

The zoning system in the new student admissions policy (PPDB) was implemented by the government as an effort to expand access and quality of education throughout Indonesia. However, in reality, this policy still creates various problems and controversies in society. This study aims to explore the causes, impacts, and relevance of the zoning policy to the principles of educational equity and national policy. The study used a qualitative approach by analyzing secondary data from scientific journals, education regulations, and case reports on zoning implementation from 2018 to 2024. The results indicate that the main problems with the zoning system do not stem from the policy concept itself, but rather from disparities in quality between schools, a lack of technical preparation from local governments, invalid population data, and poor socialization of the policy. The impact of this policy is visible

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 725
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360

Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

at the micro level in the form of challenges in the learning process due to differences in student abilities and decreased learning motivation, and at the macro level in the strengthening of stigma against favored schools and declining public trust in the PPDB system. These findings indicate that the zoning policy does not fully comply with the mandate of Article 5 Paragraph 1 of Law Number 20 of 2003 concerning the Right to Quality Education. Therefore, efforts are needed to expand school quality, technically strengthen the PPDB process, and continuously evaluate zoning policies to optimally achieve the goal of educational equity.

Keywords: zoning system, PPDB, educational equity, education policy, secondary data

Pendahuluan

Penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Indonesia merupakan sebuah kebijakan fundamental yang dirancang untuk menjawab tantangan ketimpangan dan disparitas pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan secara umum, dengan mengganti pola lama yang didasarkan pada nilai ujian nasional dan perangkap kompetisi elit sekolah. Sistem zonasi diarahkan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anak bangsa agar dapat mengakses pendidikan di sekolah terdekat dari tempat tinggal, tanpa harus bersaing secara tidak sehat dalam pencapaian nilai ujian ataupun jumlah pendaftar yang tinggi di sekolah favorit tertentu.

Sejak pertama kali diperkenalkan secara resmi pada tahun 2017 oleh pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, sistem zonasi diharapkan mampu mengurangi stigma sosial yang melekat pada sekolah tertentu yang dianggap favorit dan non-favorit. Dengan mengutamakan kedekatan geografis sebagai prioritas utama dalam proses seleksi, diharapkan akan terciptanya situasi yang lebih adil dan merata, mengurangi praktik manipulasi data domisili, serta memperkecil ketimpangan akses pendidikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mengikis persepsi bahwa kualitas pendidikan hanya dapat diakses oleh golongan tertentu yang mampu bersaing secara ekonomi dan sosial.

Namun, realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai hambatan teknis dan non teknis yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Di antaranya adalah ketidakcukupan infrastruktur pendidikan di banyak daerah, distribusi sekolah yang tidak merata, serta kesulitan dalam menyediakan data yang valid dan akurat mengenai domisili pendaftar. Bahkan, ketidaksiapan pemerintah daerah dalam penetapan zona dan pengelolaan sistem administratif menyebabkan munculnya praktik-praktik manipulatif, seperti penggunaan Kartu Keluarga palsu, pindah alamat fiktif, dan bahkan praktik jual beli kursi pendaftaran.

Selain aspek teknis, tantangan sosial dan persepsi masyarakat terhadap zonasi juga tidak kalah kompleks. Banyak orang tua dan masyarakat yang merasa dirugikan karena ketidaksetaraan dalam mutu dan fasilitas sekolah, serta adanya stigma bahwa sekolah favorit memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan sekolah lain di sekitarnya. Persepsi ini diperkuat oleh ketimpangan sumber daya manusia, fasilitas pendidikan, dan manajemen sekolah yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil

dan perbatasan. Kondisi ini menyebabkan munculnya konflik sosial, ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah, serta menjadikan proses PPDB sebagai pusat ketegangan dan protes massa yang cukup besar.

Studi evaluasi sangat penting untuk memahami secara menyeluruh operasi sistem zonasi di lapangan dan masalah utama yang dihadapi. Ini karena ada banyak masalah yang dihadapi. Diharapkan bahwa penyebab utama keberhasilan dan kegagalan kebijakan ini akan ditemukan melalui studi kasus dan analisis faktual. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan solusi strategis. Solusi ini akan memungkinkan sistem zonasi bekerja lebih efisien dan mencapai tujuan awalnya, yaitu mewujudkan pemerataan pendidikan yang sebenarnya. Diharapkan kebijakan ini tidak hanya berhenti sebagai kebijakan formal, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara Indonesia dengan melihat proses pelaksanaannya di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional, dokumen kebijakan pendidikan, serta laporan kasus yang membahas penerapan sistem zonasi dalam kebijakan PPDB di Indonesia. Pemrosesan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan, membandingkan, dan menganalisis hasil temuan dari berbagai sumber. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan, dampak, serta solusi terkait kebijakan sistem zonasi dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil analisis data sekunder, terlihat bahwa sistem zonasi di Indonesia belum begitu sempurna dalam mencapai tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Meskipun secara administratif kebijakan ini membantu masyarakat mengakses sekolah yang lebih dekat, masih banyak masalah struktural dan teknis yang menghalangi pelaksanaannya.

Masalah utama dalam penerapan sistem zonasi adalah ketimpangan kualitas antar sekolah. Perbedaan dalam fasilitas, manajemen, dan kemampuan guru membuat sekolah berkualitas tinggi tetap diminati, sementara sekolah dengan keterbatasan sarana tidak diminati. Hal ini membuktikan bahwa zonasi diterapkan tanpa pendampingan yang memadai untuk meratakan kualitas sekolah. Ketimpangan ini juga menyebabkan fenomena blank spot, yaitu daerah yang tidak memiliki sekolah layak atau jumlah sekolah tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang berusia sekolah.

Hasilnya, beberapa sekolah mengalami kelebihan peserta didik, sementara yang lain kekurangan pendaftar. Ini menunjukkan bahwa penentuan zona belum memperhatikan kondisi ruang dan distribusi sekolah secara menyeluruh. Selain itu, ketidaksiapan teknis pemerintah daerah menjadi penghambat lain. Kesulitan menentukan batas zona, lemahnya validasi data penduduk, dan kurangnya sosialisasi kebijakan PPDB menyebabkan berbagai penyimpangan seperti manipulasi alamat dan praktik jual beli kursi. Situasi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB berbasis zonasi.

Dari segi mikro, sistem zonasi memengaruhi dinamika belajar di sekolah. Keberagaman kemampuan siswa dalam satu kelas meningkat, sehingga guru wajib menyesuaikan strategi

pembelajaran dan penilaian. Namun, tidak semua guru siap menerapkan pembelajaran diferensiasi dan penilaian autentik. Akibatnya, proses belajar kurang efektif, capaian akademik menurun, dan beban kerja guru meningkat. Dari sudut pandang siswa dan orang tua, kebijakan zonasi juga memengaruhi motivasi belajar dan kepuasan terhadap sistem PPDB.

Siswa berprestasi sering merasa dirugikan karena tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan, sementara sebagian siswa lain kehilangan motivasi karena penerimaan tidak lagi berdasarkan prestasi akademik. Kondisi ini memperkuat stigma sekolah favorit dan non-favorit. Dari segi makro, kebijakan zonasi belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tanpa pemerataan kualitas sekolah dan reformasi pendidikan secara menyeluruh, zonasi berpotensi menimbulkan masalah baru dan tidak mampu menyelesaikan ketimpangan pendidikan.

Upaya meningkatkan kebijakan zonasi perlu dilakukan dengan lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah memperatakan kualitas sekolah agar kebijakan zonasi dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan fasilitas dan distribusi guru secara merata, sehingga tidak ada perbedaan besar dalam kualitas antar sekolah.

Aspek teknis dalam pelaksanaan PPDB juga perlu diperkuat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan operator, memperbaiki sistem verifikasi data penduduk, serta menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Di tingkat sekolah, para guru perlu diberi pelatihan secara berkelanjutan terkait metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan beragam siswa dan pengelolaan kelas yang heterogen. Selain itu, sosialisasi kebijakan zonasi harus dilakukan secara terus-menerus, serta evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara rutin agar penerapan zonasi tetap sesuai dengan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah.

Penutup

Sistem zonasi dalam kebijakan PPDB di Indonesia memang bertujuan untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah dan kontroversi. Masalah utama bukan pada konsep kebijakan itu sendiri, melainkan pada ketimpangan kualitas antar sekolah, kurangnya kesiapan teknis pemerintah daerah, tidak validnya data penduduk, serta rendahnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Dampak sistem zonasi terlihat pada tingkat mikro berupa tantangan dalam proses pembelajaran karena perbedaan kemampuan siswa dan menurunnya motivasi belajar, serta pada tingkat makro berupa penguatan stigma terhadap sekolah favorit dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem PPDB. Kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Hak Atas Pendidikan yang Bermutu. Untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan secara optimal, diperlukan upaya memperluas kualitas sekolah, memperkuat proses PPDB secara teknis, serta evaluasi kebijakan zonasi secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ardiani, T., Ningrum, L. I., & Nurkolis. (2024). Analisis kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan di SMP Negeri 4 Comal Kabupaten Pematang. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4)
- Hermiati, Wardiah, D., & Fitriani, Y. . (2021). Implementation of Quantum Teaching Models to Improve The Skill of Reading The Poetry Of VIII Grade Students of SMP 1 Mesuji OKI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 2313-2322.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan penerapan sistem zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870-1879.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130.
- Putri Purwati, N., Holiso, N., Indah Sukmah, N., Trihantoyo, S., & Nubhanudin, N. (2024). Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMPN 59 surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(1), 162-168.
- Umiati, T., Sumardi, L., Alqadri, B., Zubair, M., & Purwantiningsih, A. (2024). DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMPN 5 PRINGGABAYA). *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 860-871.
- Zulfa, H. S. A., Setiawan, F. A. B., & Fadli, R. M. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia Tinjauan Literatur Tentang Implementasi dan Dampaknya Terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).